JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

ISSN : 1978 -2292
Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

Penasehat : **Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.**
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab : **1. T. Daniel L Tobing, S.H.**
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Yayah Mariani, S.H., M.H.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.

Angota Dewan Redaksi (Editor) :
1. Dr. Moch. Ridwan, S.H., M.Si.
2. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
4. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
5. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.

Tim E-Journal

Journal Manager : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.

Section Editor :
1. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
2. Trisapto Wahyu Agung Nugroho, S.S., M.Si.
3. Last Sariyanti, Amd.IP., S.H., M.H.
4. Haryono, S.Sos., M.H.
5. Imam Lukito, S.T., M.H.

Sekretaris : Asmadi, S.H.

Anggota Sekretariat :
1. Suwartono
2. Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP.

Desain Grafis dan Teknologi Informasi :
1. Macyudhie,S.T.
2. Risma Sari, S.Kom
3. Saefullah,S.ST.,M.Si
4. Agus Priyatna, S.Kom

Alih Bahasa : Trisapto Wahyu Agung Nugroho, S.S., M.Si.

Alamat Redaksi
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
ISSN : 1978 -2292
Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

1. Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia .... 1 - 11
Rosita Novi Andari

2. Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Harmonisasi Peraturan Daerah .... 12 - 25
Taufik H Simatupang

3. Implikasi Struktur Program dan Anggaran Yang Sesuai (*In-Line)* di Kementerian Hukum dan HAM .... 26 - 40
Edward James Sinaga

4. Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .... 41 - 58
Nizar Apriansyah

5. Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terkait Kepakaran Peneliti Hukum .... 59 - 77
Marulak Pardede

6. Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia .... 78 - 96
Djafar Albram

TINJAUAN HUKUM

7 Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia .... 97 - 108
Ahmad Jazuli

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kekhadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 11 Nomor 1 Bulan Maret 2017 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Sumber Daya Manusia. Disamping itu, terdapat satu tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum ini. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga tetap terjaga ke dalam analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Lembaga Administrasi Negara, Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, serta seorang Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari *(Peer Reviewer)* yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terimakasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikelnya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

R E D A K S I

Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

ISSN : 1978 - 2292

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

PENGAYOMAN

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article. This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Rosita Novi Andari ***(Junior Researcher for Policy Studies and Innovation Division of the State Administration, Center for Research and Education and Training Apparatus The State Administration Institute)***

Evaluation Policy of Carrying Out of Sexual Violence Crimes of Children

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 1, March 2017

The purpose of this research is to evaluate policy of carrying out of sexual violence crimes of children applied in Indonesia and to analyze the effectiveness of the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No.1/2016 as a process of public policy and legal product. This research uses a qualitative approach. It concludes that the policy is ineffective and its stipulation viewed from formulation process and legal product (principal penalties and additional punishment) still less effective since it did not supported by a comprehensive research related to effectiveness and a long term impact of its implementation and tend to lead a matter like mechanism technical of additional penalties. Therefore, policy reformulation is necessary to be done through : (1) periodic policy evaluation and evidence-based research and (2) determination of rules and order oriented on extra and enforcement of punishment.

Keywords: *public policy, law, sexual violence crimes of children*

Taufik H. Simatupang ***(Policy Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)***

Role of Legal Drafters of Regional Offices of The Ministry of Law and Human Rights in Order to Harmonize Local Regulation

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 1, March 2017

The regional offices of the Ministry of Law and Human Rights must be had a role in arrangement process of local regulations, both in substance and harmonization activity, so inconsistencies between the legislation can be minimized. The problem of this research is how to extend the role of regional offices in order to harmonize local regulation, obstacles and how to build a pattern of coordination between the regional government. This empirical legal research uses quantitative and qualitative approaches method. It shows that regional offices have to get involved in harmonizing of local regulation but, not all regional offices have been engaged in composing of local legislations. Therefore, the regional offices should be able to convince the local government to the existence of legal drafters recognized and involved in harmonization and arrangement of local legislation through direct communication (face to face). The result of research concludes that the position of regional offices in function of drafting facilitation of local legal product is a major position start from planning, composing, discussing, ratification, stipulation, and enactment of local regulation.

Keywords: *role of regional office, facilitation function, harmonization of local regulation*

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
ISSN : 1978 -2292
Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article. This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Edward James Sinaga ***(Policy Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)***

Implication of Program and Budget Structure (In-Line) of The Ministry of Law and Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 1, March 2017

In implementing the structure of program and activity in the Ministry of Law and Human Rights during 2009-2014 was still found some weaknesses like an output of an activity not giving , directly a contribution to a goal of a program. Furthermore, the outcome of each program of work unit/technical unit of the regional office of the Ministry of Law and Human Rights has not been in-line with program carried out by the related main echelon unit. The period 2015-2019, the Ministry of Law and Human Rights has made change structure of program and budget in order to realize planning and budgeting at the regional office and technical unit that do in-line with the related main echelon unit. This research aims to analyze the implication of program and activity practice that is conducted by the Ministry of Law and Human Rights. It uses qualitative method. It concludes that structure of each technical division has not fully supported its practice yet associated with Regulation of the Minister of Finance No. 136/PMK.02/2014 concerning Preparation Instructions and Study In Implementation Function of Planning, Monitoring, Reporting and Accounting. Some obstacles is found in practice of program structure and budget with in-line like sectoral ego of division in managing, planning, budgeting, and activities; coordination of related main echelon unit in arranging, budget managing and budget planning report has not been structured; not all regional offices of the Ministry of Law and Human Rights have carried out an output standardization of procurement of goods and services; and no standardization of technical guidelines budgeting.

Keywords: program, budget, planning

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

ISSN : 1978 -2292

Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article. This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Nizar Apriansyah ***(Policy Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)***

Evaluation of Career Pattern at The Ministry of Law and Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 1, March 2017

This research aims to get a picture of data and empirical facts related to the implementation of civil servant career pattern at the Ministry of Law and Human Rights. It is an evaluative research with analytical descriptive, and also applies quantitative and qualitative approaches. Data contains primary and secondary. The result of this research shows that the Ministry of Law and Human Rights has implemented a guideline on career pattern as mandated by the regulation of the Minister of Law and Human Rights Number. M.3819.KP.04.15 / 2006 on Career Patterns and the Government Regulation No. 35/2011 on Guidelines for Preparation of Career Pattern of Civil Servants. In the implementation of the development of career system in the Ministry of Law and Human Rights has paid attention to elements as mandated by the regulations that is education, education and training of structural post, age, period of work, rank/ class, position levels, experience of positions, assessment of performance achievement and job competency. However, these rules need to be improved, because until now the Ministry of Law and Human Rights has not had guidelines career path that refers to Law No. 5/2014 concerning State Civil Apparatus, because technical obstacles still found in practice related to that regulation.

Keywords: *the Ministry of Law and Human Rights, civil servant, career pattern*

Marulak Pardede ***(Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)***

Bureaucracy Reform Policy of The Ministry of Law and Human Rights on Expertise of Legal Researcher

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 1, March 2017

One of the bureaucracy reform problems is ineffective and not efficient of government institutional. Institutional structure has not synchronized with other provisions leading a complicated process, slowness of service and decision-making, and ultimately creating a culture of feudal of apparatus. Therefore, change the institutional structure will promote efficiency and effectiveness, and acceleration of service process and decision-making in bureaucracy. It is hoped will drive a creation culture/behavior more conducive in bringing bureaucracy better. This research uses sociological juridical approach method; its type is descriptive, and data is library studies, that is primary and secondary data with qualitative data analysis. The result of this research shows that the bureaucracy reform outlined in regulation in the Ministry of Law and Human Rights, especially associated with law researchers at the Agency of Research and Development of Law and Human Rights has not been harmony, sync with the various provisions, especially regulations issued by Indonesia Institute of Sciences (LIPI) on guidelines for the selection of the field of expertise of researchers. It is necessary for the synchronization and harmonization of legislation relating to nomenclature, law researchers are expected to provide important contributions to the advancement of the duties and functions of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights, today and upcoming.

Keywords: *bureaucracy reform, expertise of researcher*

The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article. This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge

Djafar Albram ***(University Lecturer at the Law Faculty of Borobudur)***

Implementation of Customs and Excise Authority Governance of Intellectual Property In Indonesia

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 1, March 2017

The result of this research hopefully, can serve to stakeholders, especially importers of copyright and trademark holders in order to guarantee efforts and order in work as an attempt to get legal certainty, justice and transparency and stability to effectiveness of controlling to traffic of imported goods illegally, particularly the fake and piracy from abroad to Indonesia customs jurisdiction against to Regulation No.17/2006 concerning on Customs. This is a legal research. It is a normative legal method with a descriptive term. It uses secondary data that consists of primary legal material like regulations, science literature, and some cases of intellectual property offense related to this research that obtained from Directorate General of Customs and Excise archives. *It applies the theory of reward, recovery, incentive, and risk as an analysis tool. Then intellectual property needs to get protection to certain risk activities. Based on the result of this research can be concluded that the problem related to intellectual property protection is necessary to have a priority care from Directorate General of Customs and Excise officers. This problem has to do with state revenue of indirect taxes that is import duty in order to give a contribution to state finance, make national budget stronger, today and in the future.*

Keywords: *customs and excise, intellectual property protection*

Ahmad Jazuli ***(Policy Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)***

Indonesian Diaspora and Dual Citizenship In Perspective of The Citizenship Law of Indonesia Republic

Scientific Journal of Law Policy, Volume 11, Number 1, March 2017

The population of Indonesian diaspora is about 8 millions people overseas with various kind of professions like businessmen/businesswomen, researchers, scholars, professionals, art workers and so forth. Indonesian diaspora that spread all over the world have problems such as: a. Indonesia government has not optimized attention and approaches, systematically and comprehensively, yet; b). connection with their motherland is still low (potential community with weak connection), and c). Indonesia government still pay less attention to them. Issues of the dual citizenship are steps to accommodate their aspirations by the government. This research aims to analyze the problem related to its role in perspective of the Citizenship Law. It uses library research, then it concludes that the problem of the dual citizenship must be done comprehensively, not just viewed from economic aspect but other aspects too, like nationalism and state defense.

Keywords: *Indonesian diaspora, dual citizenship, the Citizenship Law of Republic of Indonesia*

Kata Kunci Bersumber Dari Artikel Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Rosita Novi Andari (Peneliti Pertama Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN)

Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan di Indonesia dan menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 sebagai proses kebijakan publik dan produk hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah diterapkan belum efektif dan penetapan Perppu dilihat dari proses perumusan dan produk hukum (aturan hukuman pokok dan tambahan) kurang efektif karena kurang didukung dengan penelitian komprehensif terkait efektivitas dan dampak jangka panjang penerapan Perppu dan cenderung menimbulkan persoalan seperti teknis mekanisme penerapan hukuman tambahan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan perlu dilakukan melalui: (1) evaluasi kebijakan secara berkala dan berbasis bukti penelitian dan (2) penetapan aturan-aturan hukum yang berorientasi pada pemberatan dan penegakan hukuman.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Hukum, Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Taufik H. Simatupang (Peneliti Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran Kantor Wilayah dalam rangka harmonisasi, faktor-faktor penghambat dan bagaimana membangun pola hubungan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Penelitian hukum empiris ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah memang sudah dilibatkan dalam harmonisasi. Namun demikian dalam penyusunan program legislasi daerah belum banyak dilibatkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor ego sektoral Pemerintah Daerah, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya dukungan dari Kantor Wilayah. Oleh karena itu Kantor Wilayah harus bisa meyakinkan Pemerintah Daerah agar keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan diakui dan dilibatkan dalam harmonisasi dan penyusunan program legislasi daerah melalui komunikasi tatap muka secara langsung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa posisi Kantor Wilayah dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah adalah posisi yang penting mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Peran Kantor Wilayah, Fungsi Fasilitasi, Harmonisasi Peraturan Daerah

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

ISSN : 1978 -2292

Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Kata Kunci Bersumber Dari Artikel Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Edward James Sinaga (Peneliti Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Implikasi Struktur Program dan Anggaran yang Sesuai (*In-Line)* di Kementerian Hukum dan HAM

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Dalam pelaksanaan struktur program dan kegiatan di Kementerian Hukum dan HAM selama kurun waktu 2009-2014 masih ditemukan beberapa kelemahan seperti keluaran (*output*) dari suatu kegiatan belum memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran program. Selain itu, hasil (*outcome*) masing-masing program pada Satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM belum *in-line* dengan program yang diemban oleh unit eselon I terkait. Untuk itu pada kurun waktu tahun 2015-2019, Kementerian Hukum dan HAM melakukan perubahan struktur program dan anggaran guna merealisasikan perencanaan dan penganggaran pada satuan kerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang *in-line* dengan unit eselon I terkait. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implikasi penerapan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Dapat simpulkan bahwa struktur masing-masing divisi teknis belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Dalam Pelaksanaan Fungsi Perencanaan, Pengawasan, Pelaporan, dan Akuntansi. Beberapa kendala yang ditemukan pelaksanaan struktur program dan anggaran yang *in-line* antara lain masih adanya ego sektoral divisi dalam pengelolaan, perencanaan, penganggaran, dan kegiatan; Koordinasi Unit Eselon I terkait penyusunan, pengelolaan anggaran serta laporan perencanaan anggaran belum terstruktur; Penggunaan standarisasi output dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya pada Kantor Wilayah belum seragam; Serta petunjuk teknis penyusunan anggaran yang tidak seragam.

Kata Kunci*:* Program, Anggaran, Perencanaan

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

ISSN : 1978 -2292

Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Kata Kunci Bersumber Dari Artikel Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Nizar Apriansyah (Peneliti Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Evaluasi Pola Karir di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran data dan fakta empiris terkait dengan Pelaksanaan pola karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Metode Penelitian dikategorikan sebagai penelitian evaluasi yang bersifat deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif Jenis sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan pedoman pola karir seperti yang diamanatkan oleh Permenkumham Nomor. M.3819.KP.04.15/2006 tentang Pola Karir dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil. Dalam implementasinya pembinaan sistem karir di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah memperhatikan unsur-unsur seperti yang diamanatkan oleh Peraturan – peraturan tersebut yang meliputi pendidikan formal, diklat jabatan, usia, masa kerja, pangkat/golongan ruang, tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja dan kompetensi jabatan. Tapi walau bagaimanapun masih ada yang harus diperbaiki, karena sampai saat ini Kemenkumham belum memiliki pedoman pola karir terbaru yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, karena dilapangan masih banyak kendalah-kendala teknis yang belum diatur dalam pedoman pola karir yang ada sekarang.

Kata Kunci: Kementerian Hukum dan HAM, Pegawai Negeri Sipil, Pola Karir

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
ISSN : 1978 -2292
Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Kata Kunci Bersumber Dari Artikel Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Marulak Pardede (Peneliti Hukum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terkait Kepakaran Peneliti Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Salah satu permasalahan reformasi birokrasi adalah belum efektif dan efesiennya kelembagaan pemerintah. Struktur kelembagaan, belum sinkron dengan berbagai ketentuan lainnya, menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Oleh karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan tersebut diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; data yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan/Library Studies, yang merupakan data primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: reformasi birokrasi yang dituangkan dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya yang berkaitan erat dengan keberadaan jabatan fungsional peneliti hukum pada Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan HAM, belum selaras, sinkron dengan berbagai ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan yang dikeluarkan oleh LIPI tentang pedoman pemilihan bidang kepakaran peneliti. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan nomenklatur, keberadaan jabatan fungsional peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kemajuan tugas dan fungsi BALITBANG HUKUM dan HAM masa kini dan terutama masa mendatang.

Kata kunci : Reformasi Birokrasi, Kepakaran Peneliti.

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
ISSN : 1978 -2292
Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Kata Kunci Bersumber Dari Artikel Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Djafar Albram (Dosen pada Fakultas Hukum, Universitas Borobudur)

Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada Stakeholder khususnya para Importir pemegang Hak Cipta dan Merek dalam rangka menjamin usaha dan ketenangan bekerja sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan transparansi serta stabilitas dalam rangka efektivitas tindakan pengawasan terhadap lalu lintas beredar masuknya barang-barang impor ilegal khususnya barang-barang palsu dan bajakan dari luar negeri yang masuk ke wilayah hukum pabean Republik Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif yang bersifat diskriptis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan meliputi buku-buku ilmiah, serta contoh kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual yang relevan dengan penelitian ini yang semuanya diperoleh dari arsip Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penelitian ini menggunakan Teori *Reward*, Teori *Recovery,* Teori *Incentive* dan Teori *Risk sebagai pisau analisis*. Selanjutnya kekayaan intelektual perlu mendapat perlindungan terhadap kegiatan yang mengandung resiko. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa masalah yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual perlu mendapat skala prioritas penanganannya oleh Aparat DJBC di lapangan. Hal ini erat hubungannya dengan pemasukan negara dari sektor pajak tidak langsung berupa Bea Masuk (BM) dalam rangka memberikan kontribusi pada keuangan negara pada saat ini dan masa yang akan datang.

Kata Kunci*:* Bea dan Cukai, Perlindungan Kekayaan Intelektual

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
ISSN : 1978 -2292
Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Kata Kunci Bersumber Dari Artikel Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Ahmad Jazuli (Peneliti Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Diaspora Indonesia Dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11, Nomor 1, Maret 2017

Populasi Diaspora Indonesia sekitar 8 juta orang di luar negeri dengan berbagai macam profesi seperti pengusaha, peneliti, mahasiswa, pekerja profesional, pekerja seni, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya Diaspora Indonesia tersebut ada beberapa permasalahan antara lain : a) belum optimalnya pendekatan dan perhatian secara sistematis dan komprehensif dari Pemerintah Indonesia; b) minimnya hubungan dengan tanah air (suatu komunitas penuh potensi namun lemah koneksi); dan c) masih kurang diperhitungkannya Diaspora Indonesia di sejumlah negara. Isu dwi kewarganegaraan adalah langkah-langkah untuk mengakomodir aspirasi Diaspora Indonesia yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis permasalahan terkait peranan Diaspora Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) berdasarkan penelusuran literatur, maka didapat kesimpulan bahwa untuk menangani permasalahan Dwi Kewraganegaraan harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tapi juga aspek lain seperti nasionalisme dan ketahanan negara.

Kata Kunci: Diaspora Indonesia, Dwi Kewarganegaraan, Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.